

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Kinerja Utama (esselon II)					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
					TOTAL	100	
		2. Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{Panjang\ jalan\ dalam\ kondisi\ mantap}{Total\ panjang\ jalan\ provinsi} \times 100\%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan			
		3. Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: PermenPUPR 13/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{Luas\ area\ yang\ telah\ ditangani}{Luas\ area\ rawan\ bencana} \times 100\%$			
		4. Pemenuhan tingkat layanan irigasi	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi. Sumber: PermenPUPR	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.			

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																									
			12/PRT/M/2015	Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$																									
		5. Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	Prosentase kesesuaian ruang terhadap pelaksanaan pembangunan	Alasan Pemilihan Indikator: dalam mendukung dan mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, pengendalian ini efektif apabila 4 aspek pengendalian terpenuhi indikator yaitu Penetapan zonasi, pemberian insetif dan disinsentif, perijinan dan penegakan sanksi Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana peruntukan ruang}}{\text{Luas lahan peruntukan}} \times 100\%$																									
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																											
		1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																									
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																									
		2. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap (Kondisi baik atau sedang, sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu). Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan																									

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Persentase Jalan Provinsi yang Belum Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	Persentase dari jumlah panjang jalan kewenangan Provinsi yang sudah memenuhi standar atau persyaratan teknis. Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi ruas jalan dapat berfungsi optimal dan memenuhi SPM jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan yang belum memenuhi standar}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$
		4. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	Persentase dari jumlah jembatan kewenangan Provinsi dalam keadaan kondisi pelayanan mantap Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi mantap, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Provinsi Banten masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi mantap}}{\text{Total jumlah jembatan provinsi}} \times 100\%$ - kondisi mantap = kondisi baik + kondisi sedang - kondisi tidak mantap = kondisi rusak berat + kondisi rusak ringan
		5. Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	Persentase dari tersusunnya Peraturan Daerah tentang RDTR pada 8 Kawasan Strategis Provinsi Banten	Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pembangunan sektoral pada kawasan strategis provinsi yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan rencana tata ruang yang baik. Untuk 5 Tahun direncanakan disusun 8 perda pada 8 kawasan strategis provinsi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Perda RTR KSP}}{8} \times 100\%$
		6. Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Provinsi Banten yang memenuhi standar yang berlaku (K3, standar kompetensi kerja, standar remunerasi minimal, mutu material dan peralatan, dll) Sumber: UU 2/2017	Alasan Pemilihan Indikator: Dalam mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi yang baik, diperlukan badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar dan mampu bersaing dengan BUJK dari wilayah lain. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah BUJK yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah BUJK di Provinsi Banten}} \times 100\%$
		7. Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	Cakupan luas penanganan banjir di Provinsi Banten termasuk kesiapsiagaan satgas siaga banjir Sumber: PermenPUPR 13/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Di Provinsi Banten masih banyak terdapat wilayah yang mengalami banjir, perlu ada upaya penanganan banjir baik pemulihan maupun pencegahan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area yang telah ditangani}}{\text{Luas area rawan bencana}} \times 100\%$

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		8. Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	Cakupan luas layanan pada jaringan irigasi kewenangan provinsi. Sumber: PermenPUPR 12/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Masih banyak areal persawahan yang belum terlayani oleh jaringan irigasi teknis. Perlu dilakukan berbagai upaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas area irigasi yang terlayani}}{\text{Total luas area irigasi}} \times 100\%$
		9. Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	Cakupan panjang pantai dalam kondisi baik. Sumber: PermenPUPR 7/PRT/M/2015	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur panjang pantai kondisi rusak yang telah ditangani. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang pantai kondisi baik}}{\text{Total panjang pantai}} \times 100\%$